



SERIAL ANW :

PRINSIP PENERAPAN PADA SISTEM AKUNTANSI NILAI WAJAR

3 SERANGKAI YANG PERTAMA.

Ringkasan riset Dr. Jan Hoesada.

Komite Kerja KSAP

PENDAHULUAN

Makalah disusun sebagai bahan baku PMK, Permendagri, Perda Sistem Akuntansi pemerintahan berbasis ANW di masa yang akan datang, mungkin pada tahun 2026/2027, merupakan tiga serangkai makalah tentang Prinsip Penerapan dalam Sistem ANW, Kendali-Internal Akuntansi

Pemerintahan dan makalah Audit Kecurangan Informasi LK berbasis ANW.

Makalah ini adalah tentang *prinsip penerapan SAK/SAP* yang diterapkan secara kumulatif, bukan tentang *prinsip akuntansi cq standar akuntansi*. Prinsip penerapan ANW mencakupi Prinsip Satu-Lawan-Satu (*The One-to-One Principle*), Prinsip Mempertemukan (*The Matching Principle*), Prinsip Larangan Harga-Tetapan Sendiri, Prinsip Mendekati Kebenaran (*The Trueing-up Principle*) dan Prinsip Atribut Campuran (*Mix Attribute Principle*).

Dokumen berjudul *Principles for the Application of Fair Value Accounting, White Paper Number Two*, sumber *Center for Excellence in Accounting & Security Analysis Columbia Business School, the Center for Excellence in Accounting and Security Analysis*, vide <http://www.gsb.columbia.edu/ceasa>, antara lain mengungkapkan berbagai kaidah penerapan standar akuntansi.

Kaidah **penerapan** SAP sebaiknya diposisikan sebagai bagian awal setiap PMK Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintahan NKRI.

IFRS/IPSAS menyatakan bahwa nilai-wajar adalah *harga- diterima* saat melakukan penjualan aset atau *harga-dibayar* tatkala pelunasan utang dalam transaksi wajar, lazim, berulang antar pelaku- ekonomi nir-hubungan-istimewa dalam mekanisme pasar-bebas, pada tanggal transaksi cq tanggal pengukuran-akuntansi untuk transaksi-tersebut. (“Fair value is the price that would be *received* to sell an asset or *paid* to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.”).

Prinsip ANW adalah bahwa harga pasar pada pasar-likuid disebut harga-pasar cuaca-normal (“*fair weather*” prices), bukan harga-pasar saat pasar-sedang di bawah-tekanan situasi luar-biasa, bukan suatu transaksi-khusus yang tak-mewakili harga pasar-bebas, misalnya penjual butuh tunai segera. Nilai bagi pemangku kepentingan atas LK setara nilai-dalam-penggunaan (value in use) pemangku-kepentingan, bukan nilai-dalam-penggunaan bagi entitas LK sendiri. Harga-pasar tak-sama dengan nilai-kini (present value), perubahan harga-pasar tak sama dengan perubahan nilai bagi pemangku-kepentingan.

LKPP/LKPD NKRI BERBASIS ANW UNTUK SIAPA ?

- DPR/DPRD yang biasa berfokus pada pertanggung-jawaban APBN/D berbasis nilai-historis versi LRA Auditan, mendapat informasi komponen LK yang lain berbasis nilai wajar , makin searah/sejalan dengan LAKIP/LKjPP.
- Kabinet cq pada pejabat K/L menggunakan informasi LK berbasis ANW dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing , memperbaiki informasi CALK tentang kinerja K/L terhapus atau terabaikan oleh informasi nilai-wajar. Sebaliknya terdapat keuntungan kenaikan ekuitas-bersih dalam LKPP karena ANW diterapkan kepada aset-tetap di neraca, menggambarkan nilai-kini representatif-zaman dan meningkatkan daya-berutang negara.
- Para ekonom, kritikus , cerdik-cendakia dan rakyat NKRI, menggunakan informasi LK berbasis ANW untuk analisis dan pembuatan masukan konstruktif bagi kabinet.
- Lembaga penyandang dana seperti IMF, WB dan lain-lain menggunakan informasi LK berbasis ANW dalam rencana-bantuan bila terjadi krisis-keuangan NKRI.
- Konsep Entitas (*entity concept*) diunggulkan IFRS/IPSAS ketimbang konsep-kepemilikan (*proprietorship concept*) , memperhatikan pemangku-kepentingan atas LK berbasis ANW , didalamnya telah termaktub aspirasi rakyat-banyak sebagai pemilik NKRI .



Akuntansi nilai wajar untuk entitas bukan lembaga-keuangan, antara lain entitas pemerintahan, adalah tentang akuntansi aset dan liabilitas terkait kegiatan-pembiayaan (*financing*)

PERTIMBANGAN MENGGANTI PP 71/2010 ANH MENJADI SEBUAH PP ANW PADA TAHUN 2026

Pertimbangan penggunaan akuntansi nilai-wajar yang bermuara pada LK berbasis nilai-wajar pemerintahan NKRI adalah

1. Administrasi-keuangan negara untuk realisasi APBN dan LRA pada SAP berbasis nilai-historis, bertujuan untuk pertanggung-jawaban keuangan-negara di hadapan DPR tidak menghalangi penerapan akuntansi dan LK berbasis nilai-wajar.
2. Pengguna LK , antara lain DPR dan kabinet , dipastikan *membergunakan* informasi nilai-wajar untuk pengambilan-keputusan atau bertransaksi dengan pihak luar entitas LK antara lain pasar-modal untuk instrumen-utang negara dan lembaga/negara pemberi-pinjaman di muka-bumi kepada NKRI pada umumnya menggunakan sudut pandang nilai-kini.
3. Nilai wajar menggunakan “nilai-keluar” (*exit value*) , yaitu harga-pelepasan diterima pemilik aset , atau biaya harus dikeluarkan atau nilai-wajar aset yang diserahkan untuk pembebasan/pelunasan suatu liabilitas , tanpa peduli dampaknya pada rumpun ekuitas atau aset-bersih.
4. Peringkat transparansi dan akuntabilitas keuangan-negara di mata-internasional meningkat-signifikan, terjadi peningkatan kelayakan atau daya-utang negara NKRI kepada negara-lain dan/atau kepada lembaga keuangan internasional seperti WB dan IMF, karena LKPP/LKPD NKRI tersesuai dengan gerakan akuntansi nilai-wajar di muka bumi, sejalan dengan pembentukan SAK/SAP versi IFRS dan IPSAS.

5. BPK sebagai petugas-pertimbangan setiap SAP baru/diperbarui , berpendapat bahwa ANW Pemerintahan NKRI adalah lebih-baik bagi negara, ketimbang SAP ber-azas nilai-historis versi PP 71/2010. Akuntansi nilai historis menggambarkan kinerja-keuangan dan akibatnya pada ekuitas, akuntansi nilai wajar menggambarkan nilai-wajar neraca tanpa peduli dampaknya pada laporan kinerja. Laporan kinerja akuntansi-nilai wajar pemerintahan tak dapat di-baca atau dikaitkan dengan LAKIP , namun lebih mendukung dan lebih menghampiri LAKIP.

TENTANG INFORMASI HARGA PASAR

Terdapat informasi harga-pasar yang dapat

- (1) dikuotasi langsung sebagai nilai-wajar,
- (2) terdapat berbagai kondisi pasar aktif, kurang aktif dan pasar-mati yang belum tentu memberi informasi nilai-wajar yang dapat dirujuk,
- (3) terdapat suatu obyek/unit aset/liabilitas dalam neraca yang memiliki beberapa pasar , memiliki beberapa harga-pasar,
- (4) terdapat berbagai obyek /unit aset/liabilitas dalam neraca nir-harga pasar,
- (5) terdapat informasi harga dari pasar-pasar lain yang dapat di-referensi dalam menentukan nilai-wajar dan terdapat berbagai obyek nir-harga pasar dengan nilai-wajar berhampiran-estimasi untuk pelaporan LK.

PRINSIP PENERAPAN AKUNTANSI NILAI WAJAR PADA LKPP/LKPD

Bila KSAP memutuskan mengganti PP 71/2010 berbasis Akuntansi Nilai Historis dengan PP baru berbasis Akuntansi Nilai Wajar versi IPSAS , PMK Pedoman Akuntansi diperbarui dan memperhatikan berbagai prinsip-penerapan SAP ANW sebagai berikut.

1. Prinsip Satu-Lawan-Satu (*The One-to-One Principle*) .

Bila pembaca LK tergantung hanya pada info nilai-wajar, prinsip satu lawan satu (*The one-to-one principle*), menyatakan bahwa apabila prinsip-akuntansi diutamakan, maka prinsip lain diluar dunia-akuntansi wajib di abaikan sebagai prinsip yang tak-memuaskan atau prinsip yang diperdebatkan (*moot*), sebagai misal; pada dunia-perdagangan, istilah harga-keluar (*exit price*) digunakan entitas LK untuk transaksi penjualan-nya dengan pelanggan/pembeli, istilah harga-masuk (*input price*) perdagangan adalah harga-keseepakatan entitas LK sebagai pembeli dengan penjual , tak digunakan dalam berakuntansi.

Prinsip Satu-Lawan-Satu (*The One-to-One Principle*) menyatakan bahwa pelaporan LK berbasis akuntansi nilai wajar dibutuhkan para pengguna yang sehari-hari berurusan dengan nilai-wajar dan atau membutuhkan informasi nilai wajar untuk pengambilan keputusan sehari-hari , misalnya para pedagang komoditas, pedagang-sekuritas pasar-uang dan pasar-modal.

Pada entitas produksi komersial pemerintahan , bila ada, akuntansi-nilai-wajar *tidak dimaksud digunakan* untuk persediaan bahan-baku , bahan-pembantu atau setengah-jadi yang akan diolah menjadi barang-jadi dalam proses kombinasi dengan berbagai input-lain, menjadi barang-jadi bernilai-tambah (*value added*) , bila tertengarai pelanggan atau pasar menjadi nilai-pasar atau nilai-jual yang seyogyanya (seharusnya) lebih besar dibanding akumulasi seluruh biaya input dan proses-produksi .

Entitas produksi menikmati

- a. selisih harga-jual sesuai harga-pasar bebas vs harga pokok produksi , termasuk
- b. selisih harga-jual vs harga-jual pesaing , bila produk di nilai istimewa oleh pasar (*diferensiasi produk*).

Pada entitas perbankan sebagai entitas-pemerintahan, bila ada

- a. deposito/tabungan adalah input berbeban bunga-deposito,
- b. kredit adalah output berbeban bunga-kredit bagi para peminjam.
- c. Untuk uang berjumlah sama, beban deposito biasa lebih rendah dari bunga-kredit, nilai-tambah proses-bisnis perbankan tercipta karena uang-tabungan (input perbankan) terkonversi menjadi kredit (output perbankan) sebagai input-kewirausahaan debitur-bank disamping mesin, bahan-baku, TK.

2. Prinsip Mempertemukan (*The Matching Principle*).

Prinsip Mempertemukan adalah *pemaduan (matching) nan-serasi seluruh aset dan seluruh liabilitas dalam sebuah perencanaan entitas LK bertujuan mencapai hasil tertentu* , antara lain

- a) laba pada entitas komersial ,
- b) pencapaian sasaran tertentu entitas nir-laba misalnya pada entitas pemerintahan , misalnya konversi utang-negara menjadi prasarana, yang bertujuan peningkatan prasarana menyebabkan pertumbuhan PDB, basis pajak dan kemampuan pembayaran kembali utang-negara.

Nilai sinergian tercipta dari kombinasi/kerjasama aset & liabilitas dalam nilai-wajar masing-masing pada neraca di LKPP/LKPD sesuai strategi & sasaran pemerintahan, sebagai misal kombinasi prasarana jalan- raya dengan prasarana pelabuhan udara/laut meningkatkan volume-perdagangan & bisnis , meningkatkan PDB.

3. Prinsip Larangan Harga-Tetapan Sendiri.

Prinsip Larangan Harga-Tetapan Sendiri sebagai bahan/input pada hampiran berbasis model (*mark to model*), antara lain asumsi/pengandaian harga-pasar input , cuaca cq curah-hujan dan estimasi panen , asumsi pasar-lesu atau bergairah , dan asumsi rekayasa-internal yang lain.

Hati-hati akan gelembung-harga semasa (*bubble price*) karena situasi lingkungan tidak-normal, harga-umum berlaku yang bukan nilai-wajar, hati-hati dengan penggunaan model kurang-tepat pada hampiran *mark-to-model* , karena berpeluang memberi info nilai-wajar nan-keliru.

4. Prinsip Mendekati Kebenaran (*The Truing-up Principle*).

Akuntansi nilai wajar selalu berupaya mendekati kenyataan/kondisi pada tanggal LK, dengan proses rekonsiliasi dan penyesuaian-akuntansi , biasa dilakukan pada tanggal pelaporan LK, antara lain dengan membandingkan jumlah tercatat dengan jumlah aktual setelah tanggal neraca.

5. Prinsip Atribut Campuran (*Mix Attribute Principle*).

Pada model beratribut campuran (*mix attribut*), sesuai kebutuhan optimalisasi kualitas informasi akuntansi/LK, sebuah aset/liabilitas dinilai pada nilai-historis dan/atau nilai-wajar ganti-berganti (1) sesuai sifat/bentuk/jenis aset/liabilitas dan (2) sesuai kondisi-situasi, misalnya nilai aktual saat-perolehan diikuti nilai-wajar tanggal LK, peristiwa nilai-historis turun nilai, peristiwa nilai-wajar turun-nilai, peristiwa awal-baru bagi penerapan akuntansi nilai-wajar (*fresh start accounting*), transaksi donasi diberikan/diterima, transaksi barter aset non-keuangan, penggunaan nilai-historis untuk menghitung beda harga-pokok vs harga-jual, nilai-wajar instrumen PM merujuk-pasar (*mark to market*), revaluasi-berkala BMN sesuai PMK, untung-belum realisasi / telah realisasi pada Laporan Kinerja Keuangan pemerintahan, penerapan prinsip layak-temu (*proper matching*) antara nilai-wajar pendapatan vs nilai-historis beban, masalah-lapangan penentuan nilai-realisasi-bersih persediaan pada tanggal LK, metode hapus-buku/*write off* dan turun-nilai-buku / *write down* tanggal neraca, peristiwa perubahan nilai-pasar setelah-tanggal neraca, penerapan akuntansi-penurunan-nilai (*impairment accounting*), untung/rugi terealisasi/ ditahan atas perubahan nilai wajar (*unrealized gain*), nilai wajar aset keuangan karena perubahan nilai-tukar antar mata-uang digunakan pada LK (*functional currency*) vs mata-uang valas untuk pos-neraca simpanan, utang, piutang, klaim dalam valas, pada suatu rumpun aset/liabilitas pada suatu tanggal LK, pada umumnya (1) sebagian pengakuan awal perolehan berbasis nilai/harga-aktual kesepakatan perdata pembeli-penjual, (2) sebagian lagi pengakuan awal menggunakan nilai-wajar, dan (3) nilai-wajar praktis digunakan sedapat-dapatnya pada tanggal neraca, bertujuan agar LK berbasis-nilai wajar.



Sekadar catatan samping, pada sektor privat, prestasi nyata manajemen cq kinerja produksi/penjualan aktual cq kinerja pendapatan-akuntansi versi akuntansi-nilai-historis pudar-sinarnya, karena hilang-rekam-jejak-historis ketika masuk dalam neraca berbasis nilai-wajar, pertumbuhan ekuitas-bersih tak lagi menggambarkan ke digdayaan manajemen, karena merupakan saldo-penetoan nilai wajar-aset di kurang nilai-wajar liabilitas. Pada sektor privat, prestasi-nyata/aktual manajemen di bidang pengembangan produk/jasa utama, pasar-utama, pelanggan-utama, serta berbagai kebijakan keuangan, produksi, pilihan strategi pemasaran cq segmentasi pasar/pelanggan, pemosisian dan pemilihan target pelanggan untuk dilayani, strategi teknologi dan SDM, kinerja inovasi, pilihan strategi bersaing dan peningkatan daya-saing, ekuitas-merek (*brand equity*).

Karena hasil/*income* digambarkan oleh perubahan neraca ANW, berbagai “kehilangan” informasi serupa di atas karena penggunaan basis akuntansi nilai-wajar terjadi pula pada pemerintahan, sehingga LAKIP makin berperan penting mendampingi era-baru LK Pemerintahan Berbasis ANW.

FITUR AKUNTANSI NILAI WAJAR

Fitur ANW atau karakteristik catatan-akuntansi dan LK berkualitas tinggi adalah sebagai berikut.

- Sistem akuntansi menghasilkan dua-nilai akhir (*2 bottom line*) Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Ekuitas pada Neraca.
- Neraca adalah basis-utama pelaporan LK
 - a. Neraca adalah sebuah nilai akuntansi nan-paripurna , mencakupi seluruh tujuan kegiatan penilaian nilai-wajar. Nilai wajar adalah nilai-likuidasian entitas tanggal neraca.
 - b. Hasil (*earnings*) sebagai perubahan nilai-entitas , bukan informasi hasil di masa- depan , tidak menginformasikan nilai , sekedar menginformasikan guncangan-berkala nilai-entitas dan risiko, karena itu tak-jadi soal apabila LK tak ber Laporan Kinerja-Keluaran, karena informasi termaktub dalam neraca sudah lengkap.
- Harga-harga tersaji di neraca di sebut nilai-buku, di mana nisbah harga vs nilai-buku (*price to book value ratio*) adalah 1.
- Sebagai guncangan tak-menentu , nisbah harga vs penghasilan (*P/E ratio*) bukan indikasi pertumbuhan penghasilan.

FITUR IDEAL AKUNTANSI NILAI HISTORIS

Sekadar sebagai kelengkapan dan perbandingan, fitur ideal ANH adalah sebagai berikut.

- ANH melaporkan kenyataan pelaksanaan-kegiatan berbasis rencana, menggambarkan beda/penyimpangan proses manajemen, hasil-diharapkan dengan kenyataan raihan-hasil dan arus-kas dengan informasi realisasi vs rencana, sebagai dasar aksi-koreksi kegiatan dan manajemen arus-kas masa yang-akan-datang.
- Laporan kinerja keuangan versi ANH lebih menggambarkan kinerja manajemen. Analist ekuitas dapat mengukur kinerja-sejati manajemen (lebih murni) sebagai basis imbalan-kerja diluar perubahan-ekuitas karena perubahan lingkungan-eksternal.
- Pengutamaan konsep penghasilan (*income concept*) menyebabkan laporan-neraca adalah residual dari laporan penghasilan(*income statement*).
- Liabilitas seperti beban-akrual (*accrued expenses*), pendapatan belum-terakui sebagai penghasilan (*unearned revenue*) , pajak-tanggung diletakkan dalam bingkai Laporan Kinerja atau Laba-Rugi , bukan bingkai neraca.
- Neraca ANH memang tidak terfokus pada nilai kini, namun lebih kepada akuntabilitas agen. Neraca tak melukiskan secara-lengkap/baik nilai-entitas pada tanggal LK , tergolong info boleh-diabaikan.
- Kinerja meraih hasil (*earnings*) memberi informasi nilai-tambah kegiatan-operasional entitas LK, berdaya-prediksi menggambarkan ekspektasi hasil di masa yang akan datang kalau kinerja masa-lalu dapat diulang/ dipertahankan, diperbaiki, disempurnakan manajemen entitas.
- ANH tak memberi info *nilai dalam risiko (value at risk)* , ANH memberi info guncangan nilai, hasil/*earning* menggambarkan guncangan operasional, kinerja produksi & pemasaran , dan guncangan atau perubahan besarnya biaya dan beban.
- ANH memandu evaluasi kinerja input & pemasok, evaluasi kinerja output atau evaluasi kinerja-pemasaran (kinerja pemasaran atau kinerja 4 P).
- Nisbah harga vs nilai-buku (*price to book value*) tak sama-dengan 1 , hasil-aktual tanggal-neraca terasumsi dapat di ulang atau diperbesar di masa-depan , tergantung kelihaihan/kemampuan manajemen entitas LK. Berpijak pada kinerja masa lalu, entitas menentukan target besar-pulangan di butuhkan (*required rate of return*) di muka,

manajemen membuat rencana-kerja mencapainya. Informasi ANW kurang-memungkinkan sebagai basis pijakan perencanaan-manajemen.

- Tuduhan bahwa informasi ANH memandang masa-lalu saja, ANH buta masa-depan , adalah tuduhan tak seberapa tepat.
- Nilai-kini (*current value*) dapat diperoleh pula dari LK berbasis ANH.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Sumber tersebut diatas menyatakan bahwa prinsip untuk penerapan / praktik SAP Berbasis Nilai Wajar mencakupi Prinsip Satu-Lawan-Satu (*The One-to-One Principle*), Prinsip Mempertemukan (*The Matching Principle*), Prinsip Larangan Harga-Tetapan Sendiri, Prinsip Mendekati Kebenaran (*The Truing-up Principle*) dan Prinsip Atribut Campuran (*Mix Attribute Principle*).

Penulis menambahkan berbagai prinsip penerapan IPSAS berbasis ANW sebagai berikut.

- SAP berbasis ANW dapat menghasilkan LKPP/D berbasis ANH karena terdapat opsi model biaya (*historis*) atau *cost model* atau semacamnya pada PSAP Aset Tetap, PSAP Aset Tidak Berwujud , PSAP Investasi, PSAP Agrikultur dan PSAP Properti Investasi. , yang dapat dipilih/ditetapkan PMK Pedoman Akuntansi.
- Opsi perlakuan akuntansi pada PSAP di pilih dan ditetapkan PMK Kebijakan Akuntansi Pemerintahan memenuhi syarat (1) intensi politis pemerintahan / kabinet baru, misalnya LKPP/D hendaknya menggambarkan nilai-wajar agar berterima global, (2) kebutuhan pengguna-utama LKPP/D , misalnya DPR/D untuk info LK berdasar opsi terpilih tersebut pada butir 1, (3) pilihan model hendaknya konsisten lintas PSAP, misalnya Model Revaluasi (*Revaluation Model*) atau semacamnya diterapkan secara seragam bagi pengajian Aset Tetap, Aset Nir Wujud, Properti Investasi dan Aset Agrikultur.
- Prinsip Kemudahan (*expediency principle*) digunakan dalam PMK Sistem Akuntansi bagi LKPP Berbasis ANW mempertimbangkan pilihan-kebijakan akuntansi tersedia pada tiap SPAP yang mudah-terap, bebas-galat, ekonomis-efisien, dan dipastikan memperoleh opini WTP atas audit LK.
- Prinsip Kemurnian ANW digunakan PMK Sistem Akuntansi Berbasis ANW dengan selalu memilih opsi Model Revaluasian atau semacamnya pada tiap SPAP, selalu menghindari pilihan Model Biaya atau semacamnya, agar LK membiaskan secara optimal nilai-wajar , dan berkualitas tertinggi di antara LK Pemerintahan negara-negara lain. Hampiran LK berbasis ANW Paripurna ini terkait pada emisi SBN, SUN NKRI dan/atau semacamnya di Pasar Modal Internasional , LK juga berguna sebagai dasar negara pemberi-pinjaman untuk evaluasi kondisi-keuangan NKRI .

Pada dunia yang makin berbasis kecerdasan artifisial dan penuh konsultan sistem akuntansi bertaraf-dunia , asumsi bahwa pelaku akuntansi pemerintahan , misalnya pemerintah-daerah, tak-mampu secara intelektual menerapkan PMK Pedoman Akuntansi Pemerintahan Berbasis Nilai Wajar , menggambarkan rasa rendah-diri atau kurang percaya-diri bangsa itu .

Jakarta, 1 Juni 2024.